

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau bisa disebut dengan PIPPK, yaitu program perwujudan otonomi daerah yang terlaksana di Kota Bandung pada tahun 2015, dengan memiliki tujuan dapat memberikan pemerataan pembangunan pada setiap wilayah di Kota Bandung.

Sejalan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mana inovasi daerah disini berarti semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Maka, pelaksanaan PIPPK diharapkan agar bisa memaksimalkan peran, tugas intansi pemerintahan dan fungsi serta dapat memperdayakan publik dengan berbasas kedaerahan yang dapat sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No 436 tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. PIPPK dilaksanakan dan dikelola oleh Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Kecamatan dan Kelurahan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 015 tahun 2019 pasal 9 memberi

penjelasan bahwa indikator keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan oleh setiap kewilayahan dapat diukur meliputi; 1) tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2) tingkat pemenuhan usulan kegiatan yang menjadi prioritas di kewilayahan 3) manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat; dan 4) kegiatan yang bersifat inovatif. Selain itu

Peraturan Walikota Bandung Nomor 015 tahun 2019 pasal 3 memberikan penjelasan mengenai PIPPK di kewilayahan yang menekankan pada prinsip-prinsip pelaksanaan program yaitu terdiri dari delapan prinsip, diantaranya; akuntabel, ekonomis, transparan, efisien, efektif, demokratis, berkelanjutan dan partisipatif. Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan berpedoman pada 8 prinsip yang telah disebutkan agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari PIPPK itu sendiri merupakan untuk memberi semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berada di kewilayahan masing-masing. Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung yang juga melaksanakan PIPPK. Mengenai pelaksanaannya, dapat dikatakan PIPPK Kelurahan Kebon Kangkung masih belum stabil baik dari segi penggunaan anggaran maupun pelaksanaan PIPPK, berdasarkan pada laporan Realisasi Anggaran (LRA) PIPPK tahun 2019-2020 ini. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan analisis efektivitas anggaran belanja PIPPK agar Kelurahan Kebon Kangkung dapat memaksimalkan penggunaan anggaran PIPPK kedepannya.

Pada pengelolaan keuangan daerah, akan menemukan kendala yang

dihadapi, terutama dalam permasalahan anggaran belanja PIPPK. Misalkan pada hasil pendapatan dan sasaran yang ternyata belum sejalan dengan kinerja keuangan disebabkan tahap realisasi yang kurang ataupun kebalikan dari itu, juga terdapatnya transisi sasaran pengaktualan secara kurang tepat sehingga mengalami transisi yang fluktuatif pada beberapa tahun yang terjadi dan ini yang dapat menandakan instansi kurang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut peneliti sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Program IPPK pada Kelurahan Kebon Kangkung:

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja PIPPK Tahun 2019-2021

Tahun	LKK	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
2019	RW	1,100,816,429	1,087,190,955	98.76%
	PKK	100,013,000	87,766,000	87.75%
	LPM	100,083,434	98,565,500	98.48%
	Karang Taruna	100,000,000	97,074,000	97.07%
	Jumlah	1,400,912,863	1,370,596,455	97.84%
2020	RW	550,000,000	515,700,205	93.76%
	PKK	50,000,000	47,710,250	95.42%
	LPM	49,980,000	35,528,850	71.10%
	Karang Taruna	50,000,000	23,252,780	46.50%
	Jumlah	699,980,000	622,192,085	88.88%
2021	RW	967,407,400	934,556,880	96.60%
	PKK	44,889,200	42,550,000	94.79%
	LPM	49,850,100	49,426,200	99.15%
	Karang Taruna	44,724,300	43,447,400	97.14%
	Jumlah	1,106,871,000	1,069,980,480	96.67%

Sumber Data: Kelurahan Kebon Kangkung 2019-2021

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan

anggaran belanja PIPPK Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung mengalami fluktuatif dan adanya peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja PIPPK sebesar 97,84%, sedangkan realisasi anggaran belanja PIPPK turun menjadi 88,88% pada tahun 2020, ketika realisasi anggaran belanja PIPPK kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan terjadi peningkatan kembali sebesar 96,67% dan hal ini menjadikan anggaran belanja PIPPK mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Dalam penyerapan budget yang diberikan oleh instansi daerah kepada kelurahan selaku SKPD yang pada akhirnya akan menimbulkan aspek, yaitu akan menunjukkan efektivitas pada perencanaan anggaran dan pelaksanaan program, apakah perencanaan itu baik atau tidak atau apakah semua program dijalankan atau belum berjalan.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan efektivitas anggaran belanja PIPPK yang masih kurang baik dari segi penyerapan anggaran maupun pelaksanaan program yang masih terkendala disebabkan karena kurangnya pendataan lebih lanjut mengenai penerimaan manfaat hal ini berhubungan dengan pengukuran efektivitas pada kepuasan terhadap program yang dalam penjelasannya kepuasan ialah tolak ukur efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang mengacu pada keberhasilan program. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Efektivitas Anggaran Belanja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah (PIPPK) pada Kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung Tahun 2020”

B. Identifikasi Masalah

Seperti yang sudah dipaparkan pada latar belakang penelitian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat pada pelaksanaan kegiatan PIPPK di kelurahan kebon kangkung
2. Kegiatan PIPPK yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kelurahan kebon kangkung masih belum berjalan secara optimal
3. Laporan realisasi anggaran belanja belum terealisasi dengan baik dan juga mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahun atau dapat disebut dengan fluktuatif

C. Rumusan Masalah Penelitian

Melihat dari identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi ke dalam rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana efektivitas anggaran belanja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Binongjati Kota Bandung tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana efektivitas anggaran belanja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Kebon Kangkung Kecamatan Binongjati Kota Bandung tahun 2020.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Setelah dipaparkan mengenai permasalahan dan tujuan, selanjutnya peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan juga dalam praktik yang bersangkutan dengan pelaksanaan administrasi khususnya keuangan publik.

1. Manfaat Teoritis

Merupakan harapan peneliti untuk hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan teori keilmuan dalam pengetahuan juga penelitian yang selanjutnya dari hasil analisis juga teori yang ada pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diperlukan untuk dapat memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi sarjana pada jurusan Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi Kelurahan Kebon Kangkung, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan PIPPK Kelurahan Kebon Kangkung. Diharapkan juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pengelolaan anggaran khususnya pada anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Kebon Kangkung.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini semoga dapat memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai efektivitas anggaran PIPPK di Kelurahan Kebon Kangkung.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik ialah bentuk kolaborasi yang dilakukan suatu kelompok orang atau organisasi dengan melaksanakan tugas tugas dalam pemerintahan untuk memenuhi kepentingan publik dengan cara yang efektif dan efisien. (Harbani Pasolong, 2018, p. 8)

Penggunaan teori oleh peneliti berfungsi sebagai kajian teoritis untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini akan membantu peneliti untuk mengetahui seberapa efektif anggaran belanja program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) pada kelurahan Kebon Kangkung Kota Bandung tahun 2020. Dalam konteks mengkaji permasalahan dan penyelesaian, serta pengkajian mendasar berdasarkan teori yang relevan dengan efektivitas anggaran.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti hendak menggunakan teori menurut Campbell J.P (1970) dalam Mutiarin (2014;97), pengukuran efektivitas yang secara umum menonjol adalah:

1) Keberhasilan program

Efektivitas program bisa dijalankan dengan keahlian operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah diresmikan sebelumnya. Keberhasilan program bisa di tinjau dari proses serta mekanisme suatu aktivitas dilakukan dilapangan.

2) Keberhasilan sasaran

Keberhasilan sasaran bisa dikatakan kesesuaian antara kriteria penerima program yang telah ditentukan sebelumnya dengan penerima program.

3) Kepuasan terhadap program

Kepuasan ialah tolak ukur efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang mengacu pada keberhasilan program. Kepuasan yang dialami oleh para pengguna terhadap mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Jika produk dan jasa yang diberikan semakin bermutu maka kepuasan yang dialami oleh pengguna akan semakin tinggi juga bisa memunculkan keuntungan untuk lembaga.

4) Tingkat input dan output

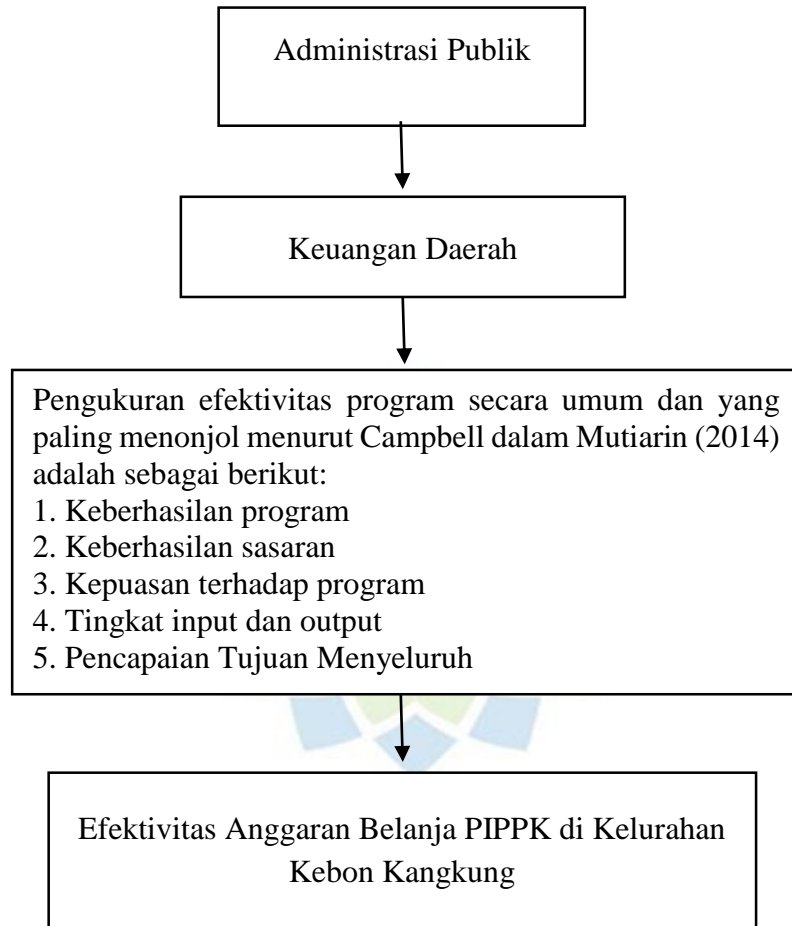
Pada efektivitas tingkatan input dan output bisa dilihat dari perbandingan antara output dengan input. Jika output lebih besar dari pada input maka bisa disebut dengan efisien dan apabila input lebih besar dari output maka bisa disebut tidak efisien.

5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Efektivitas program dapat diwujudkan dengan keterampilan operasional saat melaksanakan program kerja yang memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian efektivitas program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kemampuan operasional dalam pelaksanaan program kerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara keseluruhan, efisiensi dapat diartikan sebagai tingkat kompetensi lembaga yang dapat dicapai semua tujuannya, menyelesaikan tugas inti atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell, 1970).

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2023